BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sejak dibentuknya Turki modern pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Pasha yang kemudian diberi gelar Ataturk, Turki mulai melakukan banyak reformasi di bidang sosial, hukum, dan politik. Turki pada masa Mustafa Kemal Pasha mengalami perubahan yang cukup signifikan, bahkan dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Ataturk memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda.Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat dan mengedepan kepentingan nasionalisme mereka daripada nasiolis etnis lainya. Yang mana hal tersebut menjadi awal permasalahan terjadinya konflik antara Suku Kurdi dengan pemerintah Turki.Hal tersebut terjadi dikarenakan keengganan kelompok kurdi untuk bergabung dengan nasionalisme Turki baru. Sejak tahun 1984 hingga saat ini, pemerintah Turki masih belum bisa mengatasi konflik yang terjadi antara kelompok militan suku Kurdi melalui gerakan organisasi Partiya Kankerran Kurdistan (PKK).Yang mana sejak awal terjadinya konflik tersebut telah banyak memakan korban baik yang berasal dari Turki sendiri maupun kaum Kurdi. Sebenaranya gerakan PKKbertujuan untuk terjadinya perubahan terhadap nasib mereka dengan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima, baik hak secara etnis minoritas maupun dalam skala yang lebih luas yakni sebagai bangsa.Pemerintah Turki menganggap tuntutan tersebut sebagai ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara mereka dan harus segera ditindaklanjuti.

Gerakan protes PKK tersebut di realissasikan dalam bentuk Aktivitas-aktivitas meneror para penjaga desa, merampas desa-desa, dan membantai penduduk sipil.Semua kegiatan ekonomi politik, kemiliteran, organisasi-organisasi social dan budaya yang ada di rusak. PKK juga telah berjanji akan melenyapkan parati-partai politik, institusi-institusi pendidikan dan kebuadayan “imperialis”, badan represntatif dan legislatif, dan semua kerjasama daerah dan badan-badan yang bekerjasama dengan pemerintah pusat wilayah Kurdistan. Dengan gerakan gerakan yang anarkis tersebut, Turki berupaya melakukan upaya upaya menimalisir gerakan tersebut agar tidak berpengaruh terhadap keamanan dan kedaulatan Turki sendiri. Beberapa upaya diplomasi dilakukan Turki, akan tetapi upaya

UPN VETERAN JAKARTA

tersebut tetap tidak menjamin akan minim nya gerakan PKK yang dapat mengancam turki. Oleh karena itu untuk menjamin terjadi keamanan dan kedaulatan turki, pemerintah turki akhirnya memutuskan upaya intervensi sebagai satu satunya cara untuk menyelesaikan dan melenyap gerakan dan pengaruh PKK di wilayah Turki.Operasi intervensi turki dalam menimalisir pengaruh dan gerakan PKK diwujudkan dalam bentuk Operasi Efrat Shield (OES) dan Olive Branch Operation.

Operasi Efrat Shield (OES) adalah operasi militer yang dilakukan dengan mengikutkan partisipan lebih dari satu komponen dan diaktualisasikan dalam konsep operasi bersama.Operasi bersama tersebut diwujudkan dalam kerjasama operasa antara Turkish Armed Forces(TAF) dan Free Syrian Army (FSA). OES dilakukan berdasarkan inisiatif operasional dan taktis dari pasukan militer Turki (TAF).Operasi OES bertujuan mempertahankan kontrol lapangan untuk merebut wilayah di daerah Suriah Utara, menjaga wilayah tersebut tetap terkendali, dan menghalangi elemen organisasi teroris untuk mengambil alih wilayah tersebut. Dalam operasi ini Unsur-unsur dari TAF terdiri dari unit konvensional Komando Pasukan Darat dan batalyon Komando Pasukan Khusus (SFC). Konstituen FSA dibentuk oleh Ahrar al-Sham, Divisi Sultan Murad, Jays al-Tahrir, Brigade Al-Mutasim, Gerakan Nour al-Din al-Zinki, Brigade Salahaddin, dan Divisi Hamza. Total sekitar 4.000 pasukan TAF dan 7.000 tentara FSA secara langsung berpartisipasi dalam OES.

Operasi OES dilakukan dalam 4 fase yaitu Fase Jarablus - Sajur (24-28 Agustus 2016), Fase Çobanbey (Rai) dan Dabiq (3 September – 16 Oktober 2016), Fase Dabiq - Al-Bab (17 Oktober – 20 Desember 2016), Fase Al-Bab (21 Desember 2016 – 30 Maret 2017).Pembagian fase operasi ini dilakukan supaya operasi tersebut berjalan lancer dan efisien, sehinggan dapat menimalisir pengaruh buruk dari gerakan gerakan yang dilakukan PKK terhadapa keamanan Turki.

Selanjutnya operasi Olive Branch, operasi olive branch sebenarnya adalah operasiSelf yang menggunakanintervensi militer ke negara tetangga untuk merespon serangan bersenjata, pada prinsipnya intervensi ini tidak untuk menggulingkan pemerintahan namun demi menangkal serangan kelompok bersenjata tersebut. Hal itu dilakukan Turki karena merasa terancam dengan keberadaan PKK dan juga sayap

UPN VETERAN JAKARTA

militernya yaitu YPG yang memiliki otoritas wilayah di Suriah Utara.Potensi ancaman ini dilatarbelakangi oleh insiden-insiden teror yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit yang dilakukan oleh PKK.Oleh karena itu Turki dan beberapa Negara eropa telah memasukkan PKK dalam daftar organisasi teroris. Namun, kepentingan AS untuk melawan ISIS dan DAESH di Suriah membuat AS bekerja sama dengan PYD dan YPG. Hal ini membuat PYD semakin berkembang karena mendapat bantuan logistic dan militer dari AS.Perkembangan organisasi ini juga membuat wilayahnya semakin luas, termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Turki. Demi mencegah akan adanya serangan yang dilakukan oleh PKK, maka Turki melakukan intervensi terlebih dahulu. Operasi militer ini dinamakan Olive branch Operation. Hampir sama seperti Operation Eufrat Shield, yaitu bekerja sama dengan FSA tapi tujuan utamanya yaitu mengambil alih wilayah Afrin yang dikuasai oleh PKK dan untuk membebaskan sesama penduduk setempat dari penindasan dan penindasan kelompok-kelompok teroris yang telah disebutkan.

Pada 20 Januari 2018, Ankara memulai Operation Olive Branch ke Afrin, di barat laut Suriah. Tujuan utama operasi ini adalah untuk mengusir Partai Uni Demokrat (PYD) - cabang Suriah dari organisasi teroris Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit militernya (YPG), dari daerah yang berdekatan Turki. Keputusan pemimpin Turki ini dibuat setelah Washington mengisyaratkan niatnya untuk membentuk 30.000 penjaga perbatasan yang berpusat pada Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang sebagian besar diawaki oleh militan YPG. Justifikasi operasi ini di dasari atas kontra-terorisme dan kontra-pembrontakan. Dengan melihat nama operasinya, Turki ingin menyampaikan pesan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menduduki wilayah Suriah. Turki mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin stabilitas di wilayah tersebut setelah penghapusan organisasi teroris yang sangat mengganggu perdamaian di wilayah tersebut dan pada akhirnya wilayah yang telah diambil alih akan dikembalikan ke pemilik aslinya yaitu Suriah. Operasi olive branch demi merebut kembali kota afrin dilakukan dalam 3 fase yaitu Fase Pertempuran Darat di Afrin, Fase Pertempuran di Pegunungan Afrin dan Fase Pertempuran di Perkotaan Afrin.

Operasi militer dan intervensi itu dibutuhkan sebagai suatu cara yang akan mengakomodasi kepentingan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara mereka. Intervensi dibutuhkan untuk mengamankan wilayah dan kedaulatan dari ancaman

UPN VETERAN JAKARTA

baik itu berasal dari negara lain atau organisasi teroris Sedangkan manfaat dari intervensi yang diperoleh pemerintah adalah terjadinya keamanan wilayah dan terjamin nya kedaulatan negara dari para actor yang ingin merusak dan mengkudeta kedaulatan suatu negara. Dari sini bisa kita lihat bahwa intervensi Pemerintah Turki memiliki kepentingan Intervensi Internal seperti yang dikatakan oleh J. G. Starke dimana Turki bersekutu dengan Free Syrian Army (FSA) atau oposisi dari kubu Bashar al Assad untuk melawan terorisme dan mendukung FSA untuk memegang kendali wilayah yang diambil alih. Turki juga melakukan Intervensi dengan tujuan untuk mengamankan wilayah Turki dari ancaman luar sebelum musugh melakukan ancaman tersebut. Tindakan ini disebut sebagai self defense seperti yang dikatakan oleh Martin Ortega, yaitu berprinsip untuk menangkal serangan yang memiliki kemungkinan akan terjadi.

6.2 Saran

Dari penjelasan yang telah di jelaskan sebelumnya tentang upayaIntervensi Militer Turki dalam Mengatasi gerakan Kelompok Militan Kurdi (PKK/PYD) Terkait Konflik Suriah, penulis menyarankan pemerintah turki harus lebih berhati hati dalam melakukan intervensi, agar intervensi itu dapat tepat sasaran dan tidak merugikan orang yang bukan termasuk dari sasaran operasi tersebut seperti perempuan , anak anak, orang tua dan lain lain. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar operasi tersebut efektif dan efisien, yang mana dengan tercapai hal tersebut maka di harapkan operasi intervensi itu dapat mencapai tujuannya yaitu dapat menimalisir pengaruh dan ancaman gerakan PKK terhadap keamanan dan kedaulatan turki.

Berikutnya pemerintah harus fokus juga terhadap kebijakan pasca operasi intervensi tersebut agar pengaruh dan ancaman dari gerakan PKK yang telah di minimalisir melalui operasi dan intervensi itu tidak hidup dan berkembang lagi. Hal itu dilakukan sebagai langkah preventif agar pengaruh dari gerakan PKK tidak dapat lagi mengancam kedaulatan dan keamanan turki lagi. Dan juga pemerintah turki harus juga berkerjasama dengan negara negara lain seperti irak iran dan lain lainya untuk menekan pertumbuhan pengaruh ancaman

UPN VETERAN JAKARTA

PKK tersebut, yang mana apabila dilakukan secara bersama sama maka pengaruh dari ancaman gerakan PKK tersebut dapat diminimalisir secara cepat dan efisien.

Dari beberapa saran tersebut, diharapkan pemerintah Turki dapat terbantu untuk meningkat keamanan dan kedaulatan mereka dari ancaman gerakan PKK yang telah bertahun tahun mengancam keamanan wilayah dan rakyat Turki, dan di harapkan lagi tidak adanya terjadi pertumpahan darah yang sia sia lagi akibat dari konflik ini.

UPN VETERAN JAKARTA